

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur :

- Arief, Barda Nawawi, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ashofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Dunn, William N., 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus, 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, UGM Press, Yogyakarta.
- Erdi. 2013. *Studi Tentang Kesadaran Masyarakat Dalam Tertib Administrasi Kependudukan Di Kalimantan Barat*, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Pontianak.
- Gie, The Liang, 2002. *Administrasi Perkantoran Modern*, Yogyakarta: Liberty.
- Hadjon, Philipus M., 2001. *Pengertian Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta, Gajah Mada Universiti Press.
- Haris, Abdul dan Nyoman Adika, 2002. *Gelombang Migrasi dan Konflik Kepentingan Regional*, Yogyakarta: LESFI.
- HR, Ridwan, 2011. *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Irfan, Islamy, M., 2000, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Publik*, Bumi Aksara, Yogyakarta.
- Kaloh, J. 2003. *Kepala Daerah: Pola Kegiatan Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta. Gramedia Utama.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, 1994. Edisi Kedua, Balai pustaka, Jakarta.
- Korten, David C. dan Syahrir, 1980, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Manan, Bagir. 2002. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Pusat Studi Hukum. FH UI.

- Marbun, BN.. 1991. *DPRD, Pertumbuhan, Masalah dan Masa depannya*. Jakarta Airlangga.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010. *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Middlemas, Natha, 2011. *Pendaftaran Kelahiran Dan Pencapaian Hak-Hak Anak: Studi Kasus Kota Malang* Malang: ACICIS-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Moenir, H.A.S, 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Naja, Daeng, 2012. *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Pudyatmoko, Y. Sri, 2009. *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta.
- Puspitosari, Hesti, dkk, 2012. *Filosofi Pelayanan Publik*, Setara Press, Malang.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2006. *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Samodra, Wibawa, 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sinambela, Litjan Poltak, dkk, 2011. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Situmorang, Victor M. dan Cormentya Sitanggang, 1991. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983. *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.
- Tim Penyusun, 2007. *Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan hak Sipil dan Kebebasan Anak* Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan Indonesia.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 2001. *Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*, Jakarta : LAN RI.

Wahab, Solichin Abdul, 2011. *Analisa Kebijakan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banyumas.

## **C. Sumber lain :**

Admin, "Akta Catatan Sipil", dalam <http://dukcapil.batangharikab.go.id/profil-29-akta-catatan-sipil.html>, diakses 20/12/2018

Akhmad Sarbini. "Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara" (*Jurnal Administrative Reform*, Vol. 4 No. 4, Oktober-Desember 2016).

Aldila Marselli, dkk. 2016. *Upaya Penataan dan Penertiban dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Kendal menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*. Diponegoro Law journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Herupermedi.lecture.ub.ac.id, *Mengenal sanksi Dalam Hukum Administrasi Negara*, diakses pada tanggal 28 Agustus 2018

<https://beritagar.id/artikel/berita/jumlah-pemilih-sementara-dalam-pemilu-2019-selisih-10-juta>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2018.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Demografi\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Demografi_Indonesia) di akses pada tanggal 13 januari 2018

Luh Made Ari Sri Utami Ningsih Bandem. *Pengaruh Sanksi Administratif Terhadap Kedisiplinan Warga Untuk Melaporkan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan Kepada Instansi Pelaksana Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuba Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang*

*Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan* (Tesis, Tidak Diterbitkan, 2015).

Mega Putra Ratya, “Sulit dan Mahalnya Mendapatkan Akte Kelahiran di Indonesia”, dalam <http://www.detiknews.com>, diakses 25/12/2018